BUDIDAYA CACING DAN TOKEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mohamad Toha

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto

Email: motoha013@gmail.com

Khoirur Rozikin

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto

Email: khoirurrozikin100@gmail.com

ABSTRACT

This paper discusses the problems that arise now relating to the discovery of the method of raising worms and geckos which were previously unthinkable by humans and even classified as disgusting animals are now an alternative source of food or used as a tool to meet human needs. Problems with worms, geckos and crickets are among the categories of problems that are not textually confirmed by the Quran or the Hadith. So to find out the law applies or requires ijtihad. The legal excavation method in this study uses 3 approaches, namely: Uṣūl Fiqh's Rule Approach, Istiṣlāḥ methodology approach (exploring the potential for benefit), and the analysis approach of the opinion of fiqh scholars. The result is the worm and gecko cultivation law from the perspective of fiqh law from the point of view of the farmers, which is to be traded or consumed permitted / permissible / halal by considering the benefits.

Keywords: Cultivation, Law, Cricket, Gecko

ABSTRAK

Paper ini membahas tentang masalah yang timbul kini berkaitan dengan Ditemukannya metode pembudidayaan cacing dan tokek yang dulunya belum terpikirkan oleh manusia bahkan tergolong binatang menjijikan sekarang menjadi alternatif sumber makanan atau dimanfaatkan sebagai alat memenuhi kebutuhan manusia. Masalah budi daya cacing, tokek dan jangkrik adalah termasuk kategori masalah-masalah yang tidak ditegaskan hukumnya secara tekstual oleh Quran atau Hadis. Maka untuk mengetahui hukumnya berlaku atau memerlukan ijtihad. Metode penggalan hukum dalam penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu: Pendekatan kaidah Uṣūl Fiqh, pendekatan metodologi Istiṣlāḥ (menggali potensi kemaslahatan), dan pendekatan analisis pendapat ulama fiqh. Hasilnya hukum budi daya cacing dan tokek dari sudut pandang hukum fiqh dilihat dari tujuan pembudidayaanya yaitu untuk dijual belikan atau dikonsumsi diperbolehkan/mubah/halal dengan mempertimbangkan unsur kemanfaatannya.

Kata Kunci: Budi Daya, Hukum, Jangkrik, Tokek

PENDAHULUAN

Zaman telah banyak mengalami perubahan seiring dengan berubahnya peradaban serta tingkah laku manusia. Derasnya arus modernisasi, berkembangnya ilmu pengetahuan dan semakin berkembangnya pola pikir manusia jelas mempunyai dampak tersendiri bagi kehidupan manusia, baik itu sisi baik dan sisi buruk.

Dengan meningkatnya kebutuhan kehidupan manusia, manusia nampaknya terus berinovasi dan berkreasi untuk menemukan hal-hal baru dalam rangka memenuhi perekonomiannya. Adanya pelemahan nilai rupiah yang kian merosok membawa beban dan juga tantangan. Bukan saja menyadarkan manusia akan kelemahan dan ketidakberdayaannya di tengah himpitan dan terjangan badai kehidupan, di hadapan Allah yang maha besar, tetapi juga memaksa manusia untuk menemukan metode agar dapat *survive* dalam kehidupan ini.

Dunia ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat. Penelitian demi penelitian terus dilakukan, dan penemuan-penemuan barupun ditemukan. Hal-hal yang dahulu dianggap tidak berguna, nampak sepele, bahkan mungkin menjijikkan, kini berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat, bernilai ekonomis dan diperlukan untuk kehidupan manusia.

Ditemukannya metode pembudidayaan sumber daya hayati yang dulunya belum terpikirkan oleh manusia bahkan tergolong binatang menjijikkan sekarang menjadi alternatif sumber makanan atau dimanfaatkan sebagai alat memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu contohnya adalah pembudidayaan cacing dan tokek. Dengan adanya penemuan itu maka sebagai seorang muslim yang terikat oleh norma agama bertanya-tanya apa pandangan agama tentang pembudidayaan, meniagakan, dan mengkonsumsi hewan-hewan tersebut.

PEMBAHASAN

Budi Daya

Secara harfiah budi daya adalah “usaha yang bermanfaat dan memberikan hasil”.¹ Kata budi daya berkaitan erat dengan bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Kata budi daya bersinonim dengan kata eksploitasi, pemeliharaan, pendayagunaan. Definisi berbeda dari kata budi daya terdapat pada perbedaan bidang pembudidayaan.

Merujuk pada Peraturan Presiden nomor 48 tahun 2013 tentang budi daya hewan peliharaan pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud budi daya hewan peliharaan adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk Hewan Peliharaan dan produk hewan. Yang dimaksud

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 215.

hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.²

Dalam pertanian, budi daya merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat/hasil panennya. Usaha budi daya tanaman mengandalkan penggunaan tanah atau media lainnya di suatu lahan untuk membesarkan tanaman dan lalu memanen bagiannya yang bernilai ekonomi. Sedangkan budi daya hewan melibatkan usaha pembesaran bakalan (hewan muda) atau bibit/benih pada suatu lahan tertentu selama beberapa waktu untuk kemudian dijual, disembelih untuk dimanfaatkan daging serta bagian tubuh lainnya, diambil telurnya, atau diperah susunya. Proses pengolahan produk budi daya ini biasanya bukan bagian dari budi daya itu sendiri, tetapi masih dianggap sebagai mata rantai budi daya.³

Pembudidayaan ikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.⁴

Dari pengertian di atas terdapat perbedaan pengertian tentang budi daya karena bidang pembudidayaan tersebut berbeda antara hewan, pertanian dan perikanan tetapi memiliki kesamaan tujuan yaitu melaksanakan kegiatan budi daya untuk mengambil manfaat dari yang dibudidayakan baik secara keseluruhan atau sebagian.

Di antara budi daya hewan peliharaan adalah budi daya cacing yang kian hari terus bertambah peminatnya. Cacing kini telah naik derajatnya, dari binatang menjijikan yang dibenci menjadi alat komoditas yang dapat mendatangkan uang. Dilihat dari bahasa cacing adalah binatang kecil, melata, tidak berkaki, tubuhnya bulat atau pipih panjang dan tidak beranggota (ada yg hidup di air, tanah, perut manusia, atau perut

² Republik Indonesia, *Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2013 Tentang Budi Daya Hewan Peliharaan* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2013).

³ Wikipedia, "Budi daya", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Budi_dayacite_note-1 (6 Oktober 2019).

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2004).

binatang)⁵. Cacing yang dimaksud pada pembahasan makalah ini adalah cacing yang habitatnya di tanah, atau sering kita sebut cacing tanah.

Secara morfologi, tubuh cacing tanah tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin, dan setiap segmen memiliki seta kecuali pada 2 segmen pertama. Seta adalah struktur seperti rambut yang berfungsi untuk menggali substrat dan memegang pasangan saat kopulasi, serta sebagai alat gerak cacing tanah. Cacing tanah memiliki mulut pada ujung anterior (tidak bersegmen) yang disebut prostomium. Sebagai hewan hermaprodit, organ reproduksi cacing tanah, baik organ kelamin jantan dan betina, terletak pada beberapa segmen bagian anterior tubuhnya.⁶

Satwa melata (*al-Hasharāt*) tertubuh ramping itu kini telah dinobatkan sebagai hewan multiguna. Produsen farmasi dan kosmetik konon memakai cacing untuk berbagai produknya. Bahkan ada obat untuk penyakit tifus yang berbahan baku cacing. Selain itu, cacing juga bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah dan menanggulangi masalah sampah.

Contoh lain binatang yang tidak diperhitungkan untuk dibudidayakan sekarang dibudidayakan adalah tokek, hewan yang menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah: binatang merayap, kulitnya kasap berbintik-bintik, suaranya keras, hidup di rumah (pohon dsb).⁷ Tokek merupakan salah satu binatang yang sangat mempunyai kelebihan untuk penyembuhan penyakit AIDS, banyak masyarakat berlomba-lomba menangkap karena tergiur dengan harga yang ditawarkan pembeli. Harga tokek dengan berat 3 ons sendiri, berkisar dari harga Rp. 30 hingga Rp. 100 jutaan, sedangkan tokek dengan berat 3, 5 sampai 4 ons biasa dihargai dengan Rp. 100 hingga Rp. 800 juta. Bahkan untuk tokek berukuran di atas 5 ons harganya bisa mencapai Rp 5 miliar.⁸

Metode Penelitian

Tulisan sederhana ini akan mencoba menganalisa menggunakan metode penggalan hukum dari sudut pandang hukum fiqh tentang beberapa pertanyaan,

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 234.

⁶ Dewi Indriyani Roslim, "Karakter Morfologi dan Pertumbuhan Tiga Jenis Cacing Tanah Lokal Pekanbaru pada Dua Macam Media Pertumbuhan", *Biosantifika*, Vol. 5 No. 1 (Maret, 2013), 2.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1476.

⁸ Muhammad Masruhan, *Maslakul Murīdīn Fi Natā'ijil Mūbahithīn* (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa'il, 2010), 64.

bagaimanakah hukum membudidayakan cacing dan tokek? Apakah boleh hewan-hewan tersebut dibudidayakan menurut hukum fiqh?

Nah, salah satu solusi untuk mengurai “benang kusut” itu adalah dengan mengetahui substansi dan esensi hukum-hukum syariat. Jadi, selain kita harus mempelajari hukum-hukum yang sudah “jadi” (*furū‘ fiqh*), kita juga dituntut untuk menguasai pangkal persoalan atau substansi hukumnya. Cara satu-satunya untuk mencapai hal itu tidak lain adalah dengan mempelajari kaidah-kaidah fiqh, baik kaidah *uṣūliyyah* maupun *fiqhiyyah*. Dengan mengetahui dua jenis kaidah ini, maka kontradiksi hukum yang biasa menghantui perasaan kita tidak akan kita dapati lagi. Sebab pada dua ranah metodologis itu, nilai-nilai esensial syariat terurai dengan sangat lugas, logis, tuntas dan rasional.⁹

Bila para sahabat tidak menemukan jawaban atas suatu persoalan baik dalam Quran maupun hadist (*naṣ*), maka mereka berupaya melakukan ijtihad sendiri. Ijtihad pada masa ini oleh sahabat dilancarkan pada persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara langsung oleh nash, dan digali ranah substansialnya. Mereka berupaya meneliti ‘*illat*’-*illat* hukum yang dikandung *naṣ* dan mengkomparasikannya dengan persoalan baru yang mereka hadapi. ‘*Illat*’ yang dikandung di nash itu kemudian disematkan kepada persoalan yang belum memiliki kepastian hukum tersebut. Inilah menjadi cikal-bakal penggunaan *qiyās* (analogi) sebagai salah satu metode penggalan hukum (*Istinbāt al-Aḥkām*), terutama pada persoalan-persoalan yang belum diketahui hukumnya karena belum dijelaskan secara tegas oleh *naṣ*.¹⁰

Dalam menggali hukum (*Istinbāt al-Aḥkām*) terdapat beberapa metodologi yang dipakai oleh para imam mazhab, satu imam mazhab dengan imam mazhab yang lain berbeda dalam metodologinya, diantaranya adalah: Imam Mālik merumuskan konsep *istiṣlāḥ* (*maṣlaḥah mursalah*) kepada murid-muridnya. *istiṣlāḥ* adalah sebuah metode penggalan hukum melalui upaya menggali potensi kemaslahatan yang tidak dijelaskan langsung oleh *naṣ*; apakah diperhitungkan atau didisfungsikan (*ihmāl*), tapi sebenarnya menjadi substansi dari syariat itu sendiri. Lalu Imam Shāfi‘i menggunakan metodologi

⁹ Maimoen Zubair, *Buku Satu Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2009), 5-6.

¹⁰ Ibid., 22.

qiyās (analogi) guna menggali kepastian hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh nash, dengan berupaya menemukan titik temu (*al-‘Illat al-Jāmi‘ah*) antara persoalan yang tidak dijelaskan hukumnya, dengan persoalan lain yang telah mempunyai kepastian hukum dari nash. Sementara Imam Hanafi melalui murid-muridnya memperkenalkan konsep *istihsān*, yakni sebuah prinsip penggalian hukum yang mengabaikan peran *qiyās jaliy* dan beralih pada *qiyās khafīy*, karena ada landasan dalil syar’i yang lebih kuat.¹¹

Dalam kajian *Uṣūl Fiqh* bahwa kasus hukum (kasus yang ingin diketahui hukumnya) yang dihadapi oleh umat manusia itu dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, kasus yang ingin diketahui hukumnya itu telah ditegaskan hukumnya secara langsung, tegas dan jelas oleh teks Quran atau Hadis. Kedua, tidak ditegaskan hukumnya oleh Quran atau Hadis.

Suatu benda atau perbuatan itu tidak terlepas dari lima perkara, yaitu halal, haram, syubhat, makruh dan mubah. Terhadap barang yang halal secara mutlak kita disuruh oleh Allah untuk memakannya; sedang terhadap yang haram kita disuruh untuk menjauhinya. Karena makanan yang halal itu dapat menambah cahaya iman dan membuat terkabulnya doa.¹²

Analisis Hukum Fiqh

Ijtihad merupakan sebuah media elementer yang sangat besar peranannya dalam kontruksi hukum-hukum Islam (*fiqh*). Tanpa peran ijtihad, mungkin saja kontruksi hukum Islam tidak akan pernah berdiri kokoh seperti sekarang ini, dan ajaran Islam tidak akan mampu menjawab tantangan zaman dengan beragam problematikanya. Dengan demikian, ijtihad adalah sebuah keniscayaan dalam Islam.

Namun harus pula diakui bahwa ijtihad merupakan faktor utama pemicu perbedaan pendapat dan kontradiksi hukum (*khilāfiyyah*) antar ulama. Pertentangan yang selama ini berlangsung di kalangan *fuqaha* adalah akibat dari perbedaan metodologi ijtihad yang mereka gunakan. Tapi justru dari situlah khazanah keilmuan Islam terlihat begitu kaya dan anggun di tengah polemik intelektual yang variatif dan semarak.

Masalah budi daya cacing dan tokek adalah termasuk kategori masalah-masalah yang tidak ditegaskan hukumnya secara tekstual oleh Quran atau Hadis. Maka untuk

¹¹ Ibid., 26-27.

¹² Ahmad Shiddiq, *Benang Tipis Antara Halal & Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 9.

mengetahui hukumnya berlaku atau memerlukan ijtihad. Menurut hemat penulis, pemecahan masalah ini dapat dilakukan lewat tiga pendekatan antara lain sebagai berikut: Pertama, Pendekatan kaidah *Uṣūl Fiqh* “الأصل في الأشياء الإباحة” hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Kedua, pendekatan metodologi *Istiṣlāḥ* (menggali potensi kemaslahatan). Ketiga, pendekatan analisis pendapat ulama fiqih.

1. Pendekatan kaidah *Uṣūl Fiqh* “الأصل في الأشياء الإباحة” hukum asal segala sesuatu adalah boleh.

Penemuan-penemuan baru yang ada pada masa kini, telah dipersiapkan perangkat hukumnya secara lengkap oleh Islam. Jauh-jauh hari ajaran Islam telah memprediksikan hal itu dan memberikan ketentuan-ketentuan hukum dalam bingkai kaidah yang sangat sederhana, yaitu *al-Aṣlu al-Ibāḥah*.

Pada era sekarang, kaidah ini dapat diterapkan jika kita menemukan hewan, tumbuhan, atau apa saja, yang belum diketahui status hukumnya dalam syari'at. Semua jenis barang tersebut dihukumi halal, sesuai substansi yang dikandung kaidah ini.

Budi daya cacing dan tokek merupakan hal baru, hukumnya belum/tidak ditegaskan, bahkan belum disinggung sama sekali oleh Quran dan Hadis. Dengan demikian, untuk menyelesaikan masalah hukumnya maka berpedoman pada kaidah: “*Pada dasarnya hukum asal segala sesuatu adalah boleh*”. Argumen yang mendasari pendapat ini adalah:¹³

- a. Quran Surah al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Baqarah ayat 29).

Ayat ini menandakan bahwa segala sesuatu yang ada di daratan bumi dianugerahkan untuk kemaslahatan manusia. Sementara wujud nyata anugrah tersebut adalah pemberian hukum halal (*ibāḥah*) pada apa saja yang ada didalamnya. Artinya manusia diberi kebebasan untuk memanfaatkan dan

¹³ Maimoen Zubair, *Buku Satu Formulasi Nalar Fiqih*, 151-152.

mengelola isi bumi, selama tidak ada penegasan dari Allah. Bahwa hal itu adalah terlarang.

- b. Quran Surah al-A'rāf ayat 32:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. Al-A'rāf ayat 32).

- c. Quran Surah al-An'ām ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. al-An'ām Ayat 145).

- d. Quran Surah Al-A'rāf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-A'rāf Ayat 33).

Tiga ayat terakhir ini menandakan maksud ayat pertama. Secara substantif, dalam tiga ayat ini Allah swt. Mengecam orang-orang yang mengharamkan ‘pakaian-pakaian’ dan rizki-rizki yang telah Allah swt. Berikan kepada manusia. Kecaman implisit ini memberikan kesan bahwa sebenarnya tidak ada hukum haram atas segala sesuatu yang ada di muka bumi. Kalaupun ada, maka itu hanya bagian kecil yang telah mendapat pengesahan langsung dari syari’at, sementara yang lain tetap halal. Karenanya, ulama ‘pro *ibāḥah*’ mengklaim bahwa hukum asal segala sesuatu adalah halal (*ibāḥah*), sedangkan yang haram adalah pengecualian.

- e. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Hakim r.a.:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَأَقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ :.....

“Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya, maka itulah yang halal dan apa yang diharamkan-Nya, maka itulah yang haram. Sedangkan apa yang didiamkan-Nya, maka itu adalah yang dima’afkan maka terimalah pema’afan dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah lupa. Kemudian beliau membaca ayat, “Dan tidaklah tuhanmu lupa.” (HR. Hakim dan Bazzar).¹⁴

Esensi Hadis ini akan menggiring pemahaman kita pada redaksi empat ayat al-Quran yang telah disebutkan sebelumnya. Di sini dijelaskan bahwa hukum halal dan haram telah jelas posisinya, sedangkan hal-hal yang belum dijelaskan oleh syariat adalah terampuni (*ma‘fuw*). Ini bukan karena Allah lupa (sebab Allah memang tidak pernah lupa), melainkan karena ingin memberikan anugerah kepada hamba-hambanya. Dan perlu dicatat, sesuatu yang dianugerahkan pasti lah bukan hal-hal yang dilarang. Dengan demikian, segala sesuatu yang hukumnya tidak dijelaskan oleh Allah swt. Adalah halal.

Budi daya cacing dan tokek dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru, mengatasi pengangguran dan memberikan tambahan pendapatan di tengah himpitan ekonomi dan naiknya harga kebutuhan. Oleh karena termasuk katagori hal-hal yang belum/tidak di singgung secara tekstual (*naṣ*) maka sesuai dengan keumuman ayat dan

¹⁴ Ahmad Shiddiq, *Benang Tipis Antara Halal & Haram*, 13.

hadis di atas, dan senada dengan kaidah *al-Aşlu fī al-Aşhya' al-Ibāḥah*, menurut hemat penulis budi daya cacing dan tokek hukumnya jelas mubah/halal.

2. Pendekatan Metodologi *Istiṣlāḥ* (menggali potensi kemaslahatan).

Maṣlaḥah mursalah sebagai salah satu metode *istinbāt* (penggalian) hukum mempunyai aturan main yang harus diperhatikan, antara lain:¹⁵

Pertama, *Maṣlaḥah* tersebut harus nyata, tidak sekedar prasangka atau pikiran. Maksudnya pensyariaan dengan dasar *maṣlaḥah mursalah* harus jelas nilai “memberikan manfaat dan menghindarkan kemadlaratannya”. Tidak boleh *Maṣlaḥah* tersebut hanya memandang unsur memberikan manfaat tanpa mempertimbangkan unsur kemadlaratan.

Kedua, *Maṣlaḥah* tersebut harus bersifat *Maṣlaḥah 'Ummah* (umum). Artinya, kemanfaatan yang ditimbulkan harus dapat mengjangkau mayoritas manusia bukan hanya berdasarkan golongan atau individu.

Ketiga, hukum yang dihasilkan dengan *Pertama*, *Maṣlaḥah* tidak boleh berbenturan dengan hukum baku atau dasar yang berlandaskan *naş* atau *ijma'*.

Budi daya cacing dan tokek jelas merupakan *maṣlaḥah mursalah*, yaitu suatu maslahat/kemaslahatan yang tidak ada dalil tertentu baik dari Quran maupun Hadis yang membenarkan atau membatalkannya. Bentuk kemaslahatannya adalah membuka lapangan kerja baru, menjadi solusi atas maraknya buruh/pegawai yang terkena PHK, sebagai salah satu sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, mengatasi masalah sampah, bahan baku obat-obatan, dan memiliki nilai ekonomis.

Penelitian FMIPA UNPAD pernah menyimpulkan, penyakit seperti tifus dan diare bisa diatasi dengan ramuan obat yang mengandung ekstrak *Iumbricus* (cacing tanah). Pemanfaatan cacing tanah sebagai obat, juga hal biasa dalam khasanah pertobatan Cina. Cacing tanah jenis cacing kalung (calung), yang besar dan “berkalung” abu-abu keputih-keputihan di dekat kepalanya itu, dipercaya berkhasiat menyembuhkan tifus, luka dalam, panas dalam, maag, bahkan kanker.¹⁶

Menurut hemat penulis, budi daya cacing dan tokek jelas merupakan maslahat. Dan maslahat ini tidak berlawanan dengan prinsip umum tujuan penyariaan hukum

¹⁵ Ahmad Idris Marzuqi, *Buah Pikiran Untuk Umat Telaah Fiqh Holistik* (Kediri: KASTURI, 2008), 53-54.

¹⁶ Anton Apriyantono, *Panduan Belanja Halal dan Konsumsi Halal* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), 185-186.

Islam. Sebagaimana diketahui, tujuan umum pensyariaan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan/bencana. Budi daya cacing dan tokek sebagai upaya mencari sumber pendapatan/penghasilan, dengan penghasilan yang memadai diharapkan akan tercukupi kebutuhan hidup seseorang dengan baik. Dengan tercukupi kebutuhan hidupnya dengan baik, akan sehat fisiknya, terpelihara jiwanya, sehat akalanya, terpelihara kehormatan/keturunannya, dan agamanya. Rosulullah SAW telah menegaskan bahwa kefakiran dapat berdampak pada kekufuran.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa status hukum budi daya cacing dan tokek dengan tujuan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka hukum budi dayanya mubah/halal.

3. Pendekatan Analisis Pendapat Ulama Fiqih

Untuk melihat hukum budi daya cacing dan tokek maka dilihat tujuan budi daya itu, sudah diketahui oleh kebanyakan orang bahwa tujuan budi daya adalah untuk memperoleh manfaat dari hewan-hewan yang dibudidayakan, manfaat itu bisa berupa hasil penjualan, maka untuk mengetahui hukum budi dayanya kita harus mengetahui hukum tujuannya yaitu hukum jual beli cacing dan tokek. Dan tujuan budi daya yang lain adalah untuk mengkonsumsinya, maka hukum budi dayanya juga dilihat dari hukum mengkonsumsinya. Kalau boleh dikonsumsi maka boleh dijual-belikan dan juga tentunya boleh pula dibudidayakan.

Hukum jual beli cacing dan tokek terdapat *khilaf* (beda pendapat) dikalangan ulama ada yang mengharamkannya, karena dianggap hina, dan ada yang membolehkannya, karena ada unsur manfaatnya.

Kalangan ulama Hanafi tidak mensyaratkan syarat ini (yakni, barang yang dijual itu harus suci dan bukan yang najis). Karenanya, mereka memperbolehkan jual beli barang-barang najis, seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan, kecuali yang memang terdapat larangan untuk memperjual-belikannya, seperti minuman keras, (daging) babi, bangkai dan darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jual-beli binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Tolok ukurnya menurut mereka (mazhab Māliki) adalah, semua yang bermanfaat itu halal menurut

syara', karena semua (makhluk) yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.¹⁷

Sah jual-beli serangga dan binatang melata, seperti ular dan kalajengking jika memang bermanfaat. Parameternya meneurut mereka (mazhab Māliki) adalah, semua yang bermanfaat itu halal menurut syara', karena semua (makhluk) yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.¹⁸

Dalam kitab *al-Kāfi fi Fiqhi Ahli al-Madīnah* jus 2 halaman 674-675 menjelaskan tentang hewan-hewan yang boleh dijual dan yang tidak boleh dijual terbagi menjadi 2 kelompok. *Pertama*, hewan yang boleh dimakan dagingnya dan yang *Kedua*, hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Untuk yang pertama, setiap hewan yang boleh dimakan maka boleh dijual-belikan. Dan untuk katagori yang kedua hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, dibagi menjadi dua berdasarkan manfaatnya, *Pertama*, hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya dalam keadaan hidup tapi memiliki manfaat seperti untuk dikendarai, dipelihara, berburu dan lain sebagainya dari apa saja yang bermanfaat bagi manusia. Maka boleh dijual-belikan kecuali anjing karena ada larangan dari Rosulullah untuk memberi harga anjing. Tetapi ada pendapat bahwa anjing untuk tujuan membantu berburu dan penjagaan boleh memperjualbelikan. *Kedua*, katagori hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dan tidak pula memiliki manfaat, maka untuk katagori ini tidak boleh diperjualbelikan.

KESIMPULAN

Budi daya hewan peliharaan adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk Hewan Peliharaan dan produk hewan. Yang dimaksud hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Hukum budi daya cacing dan tokek dari sudut pandang hukum fiqih dilihat dari tujuan pembudidayaanya yaitu untuk dijualbelikan atau dikonsumsi diperbolehkan/mubah/halal dengan mempertimbangkan unsur kemanfaatanya.

¹⁷ *Lajnah Ta'lif Wa al-Nashr, Ahkāmul Fuqaha*, Terj. M. Djameluddin Miri, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mu'tamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Khalista, 2007), 546-547.

¹⁸ *Ibid.*, 547.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyantono, Anton. *Panduan Belanja Halal dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Roslim, Dewi Indriyani “Karakter Morfologi dan Pertumbuhan Tiga Jenis Cacing Tanah Lokal Pekanbaru pada Dua Macam Media Pertumbuhan”, *Biosantifika*, Vol. 5 No. 1 (Maret, 2013).
- Marzuqi, Ahmad Idris. *Buah Pikiran Untuk Umat Telaah Fiqh Holistik*. Kediri: KASTURI, 2008.
- Masruhan, Muhammad. *Maslakul Murīdīn Fi Natā’ijil Mūbahithīn*. Kediri: Lajnah Bahtsul Masa’il, 2010.
- Miri, Djamaluddin. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mu’tamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2004).
- Republik Indonesia, *Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2013 Tentang Budi Daya Hewan Peliharaan* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2013).
- Shiddiq, Ahmad. *Benang Tipis Antara Halal & Haram*. Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Wikipedia, “Budi daya”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Budi_dayacite_note-1 (6 Oktober
- Zubair, Maimoen. *Buku Satu Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2009.